PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Oleh

Pangihutan Marbun
2440058016

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Pangihutan Marbun
2440058016

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Pangihutan Marbun
NIM	:	2440058016
Program Studi	:	Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk medapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 3 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan

Pangihutan Marbun

2440058016

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Pertanggungjawaban Pejabat Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Oleh:

Nama	: Pangihutan Marbun
NIM	: 2440058016
Program Studi	: Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 3 Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.)	(Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.)
NIDK : 8932890024	NIDN : 0123129201

Ketua Program Studi Hukum	Dekan
(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)	(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN : 0327046303	NIDN : 0302117904

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Juli 2025 Telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Pangihutan Marbun
NIM	: 2440058016
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi"** oleh tim penguji yang terdiri :

Nama Penguji	**Jabatan Penguji Tim Penguji**	**Tanda Tangan**
1. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.	Ketua	----------
2. Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.	Anggota	----------
3. Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M.	Anggota	----------

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Pangihutan Marbun
NIM	:	2440058016
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Hukum
Jenis Tugas Akhir	:	Skripsi
Judul	:	Pertanggungjawaban Pejabat Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Juli 2025

Pangihutan Marbun
2440058016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan kasihNya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pejabat Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi"

Skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat dalam meraih gelar kesarjanaan Strata (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Penulis mendapatkan banyak bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak di dalam penulisan skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Atas selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam prosesnya. Penulis menyampaikan penghargaan kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Dr. Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum.
5. Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan yang membantu penulis dalam penyelesaian skrispi ini.
6. Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan yang membantu penulis dalam penyelesaian skrispi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum.
8. Seluruh staff Tendik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Seluruh staff perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

10. Perhatian dan dukungan Keluarga kecil terkasih Marni Jayanti, S.P., Istriku dan anak-anakku tercinta, Christie Yovela Marbun, Adventus Haholongan Marbun dan Benjamin Neo Parsaoran Marbun (terkhusus untuk anakku Benjamin Neo Parsaoran Marbun yang lahir pada proses penulisan skripsi ini).
11. Keluarga besar yang terkasih yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum ini : Bapak dan Mamak, Amang dan Inang Mertua, Adik-adik beserta ipar-iparku serta keponakan-keponakan yang kukasihi.
12. Sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuangan kelas karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan pihak-pihak lain yang tidak dapat kusebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripis ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan sehingga dengan rendah hati penulis menerima masukan yang membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang di kemudian hari.

Jakarta, 3 Juli 2025

Pangihutan Marbun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

VISI DAN MISI.....ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....iv

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....v

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK xi

***ABSTRACT* ..... xii**

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Permasalahan..... 2

B. Rumusan Masalah 9

C. Ruang Lingkup Penelitian.....9

D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....9

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 10

F. Metode Penelitian.....5

G. Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 19

B. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....27

C. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia 36

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Justice 44

B. Ruang Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 58

C. Peran Lembaga Pengawas dalam Sistem Pertanggungjawaban.....60

D. Inovasi dan Digitalisasi dalam Pengadaan *(e-Procurement)* 65

E. Teori Good Governance Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....69

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.....74

A. Penerapan Hukum terhadap Pejabat Pengguna Anggaran dalam Proses Pengadaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi 74
B. Penerapan Hukum terhadap Pejabat Pengguna Anggaran dalam Tindak Pidana Korupsi 78

BAB V PENUTUP.....90

A. Kesimpulan 90
B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA.....92

ABSTRAK

A. Nama : Pangihutan Marbun
B. NIM : 2440058016
C. Bagian : Hukum/Hukum Pidana
D Judul : :Pertanggungjawaban Pejabat Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi
E. Halaman : 95 Halaman, Daftar Pustaka.
F. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengguna Anggaran, Barang dan Jasa, Korupsi, *Good Governance*.
G. Ringkasan Isi :

Korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP) merupakan salah satu masalah paling krusial dalam sistem tata kelola keuangan negara di Indonesia. Tingginya angka penyimpangan dalam PBJP, sebagaimana dilaporkan oleh KPK dan berbagai lembaga lainnya, menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap pertanggungjawaban pejabat pengguna anggaran. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana pejabat pengguna anggaran apabila terjadi tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam kerangka teori, penelitian ini mengacu pada teori good governance serta teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana untuk menilai peran strategis pejabat pengguna anggaran dalam mencegah praktik korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan dari pejabat pengguna anggaran kepada bawahannya, seperti kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, kerap menimbulkan celah hukum dan ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, meskipun pelanggaran terjadi pada level teknis, pengguna anggaran tetap memiliki tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai dalam pengawasan atau melakukan pembiaran. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulatif dan peningkatan pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas pejabat pengguna anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah dan memberantas korupsi secara efektif.

H. Daftar Acuan : 23 Buku, 8 peraturan perundang-undangan, 5 jurnal/artikel
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.,

ABSTRACT

A. *Name* : Pangihutan Marbun
B. *NIM* : 2440058016
C. *Specific Program* : *Public Law*
D Title : *Accountability of Officials Using Government Goods and Services Procurement Budgets for Corruption*
A. *Page* : *95 Page, Appendix, References*
B. *Keyword* : *Criminal Liability, Budget User, Government*
: *Procurement, Corruption, Good Governance.*
C. *Summary* :

Corruption in the government procurement of goods and services sector (PBJP) remains one of the most critical issues within Indonesia's public financial management system. The high incidence of irregularities in PBJP, as reported by the Corruption Eradication Commission (KPK) and other institutions, highlights the urgency of re-evaluating the criminal liability of budget users (Pejabat Pengguna Anggaran). This study aims to examine the procurement process as regulated under Presidential Regulation Number 46 of 2025 and to analyze the scope and limitations of the criminal liability of budget users in the event of corruption. This research employs a normative legal method, using statutory, conceptual, and case study approaches. The data were collected through library research and consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The theoretical framework is based on the concepts of good governance and legal responsibility in criminal law to assess the strategic role of budget users in preventing corruption. The findings reveal that the delegation of authority from budget users to their subordinates—such as authorized budget users and commitment-making officials—often creates legal loopholes and ambiguity in criminal responsibility. In practice, even if violations occur at a technical level, the budget user may still bear legal responsibility if negligence in supervision or deliberate omission can be proven. Therefore, this study emphasizes the need for regulatory clarity and enhanced internal control mechanisms to reinforce accountability among budget users in public procurement, aiming to strengthen anti-corruption efforts within Indonesia's public sector.

D. *Reference* : *23 Books, 8 legislation, 5 journals/artclels*
E. *Thesis Advisor I* : Dr. Petrus Irwan Panjaitan, S.H.,M.H.
Thesis Advisor II : Chris Anggi Natalia Berutu, S.H., M.Kn.